

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>04/SOP/PPID</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>16 Juni 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>17 Juni 2022</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>           Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi    <b>Hendrik Taruma, S.STP, M.Si</b>            NIP. 19780126 199612 1 001         </td></tr> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Penetapan dan Pemutakhiran DIP</td></tr> </table>	Nomor SOP	04/SOP/PPID	Tanggal Pembuatan	16 Juni 2022	Tanggal Revisi		Tanggal Pengesahan	17 Juni 2022	Disahkan Oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  <b>Hendrik Taruma, S.STP, M.Si</b> NIP. 19780126 199612 1 001	Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP
Nomor SOP	04/SOP/PPID												
Tanggal Pembuatan	16 Juni 2022												
Tanggal Revisi													
Tanggal Pengesahan	17 Juni 2022												
Disahkan Oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  <b>Hendrik Taruma, S.STP, M.Si</b> NIP. 19780126 199612 1 001												
Judul SOP	Penetapan dan Pemutakhiran DIP												

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	1. Memahami tentang Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik. 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik
2	Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	
3	PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	
4	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
6	Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	
7	Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
SOP Pelayanan Informasi Publik		1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Term of reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1 Prosedur penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik adalah salah satu tugas dari PPID Kabupaten Tapanuli Utara. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Kabupaten Tapanuli Utara tidak berjalan baik		Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

**SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG		KETERANGAN
		PPID PEMBANTU	PPID UTAMA	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tujuan masing-masing komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik yang diperlukan sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.				1. UU No 14 Tahun 2008; 2. UU No 25 Tahun 2009; 3. UU No 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun 2010; 6. Perki No 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen Perangkat Daerah.
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasiannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengajuan tentang konsekuensi dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				1. UU No 14 Tahun 2008; 2. UU No 25 Tahun 2009; 3. UU No 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun 2010; 6. Perki No 1 Tahun 2013	Secara berkala, serta merta, setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasikan i
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.				Alat tulis kantor	Berkala, serta merta, setiap saat	DIDP

4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu bantuan ganti oleh Atasan PPID	Surat Keputusan DIP yang ditandatangan oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengunggah DIDP ke website resmi PPID Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun sarana resmi lainnya.		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya Konten DIDP di website PPID Kabupaten Taput		